Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam
Vol. 3, No. 1, 147-163, 2021

Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah

Ramli
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ramli@ar-raniry.ac.id

Abstract

One form of actualization in Indonesian education was establishing a body called School Committee that replaced the existence of the Education Organizing Body (BP3), stipulated through the Decree of the Minister of National Education No. 044/U/2002 dated April l2, 2002. The name of BP3 was changed to the School Committee due to the need for full community involvement in improving education quality. One of the school committee's objectives is to increase the responsibility and participation of the community in the implementation of education in the education unit. In this present study, the focuses were on the process and the mechanism of the formation of the madrasah (Islamic school) committee organization, the planning carried out by the madrasah committee in improving the quality of madrasah education, and the implementation of the madrasah committee programs in improving the quality of education in Aceh Besar District. This study employed qualitative research methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Findings showed that the process and the mechanism in forming the madrasah committee in Aceh Besar District were based on the decision of the Ministry of Education on the establishment of community-based organizations, including by mutual deliberations or meetings held every three years in a transparent, accountable, and democratic manner, and by involving the community as an education unit partner. Further, the planning of the madrasah committee in improving the quality of madrasah education was carried out by establishing the structure of the committee and holding regular meetings with madrasahs and the community every three months or at the end of each semester, and also by preparing and organizing religious and national holidays together with other madrasahs. In addition, the madrasah committee programs were well implemented in Aceh Besar, as seen from the involvement of all elements from both madrasahs as the organizers of the activities and the community as the provider of advice and input. The programs included the religious and extracurricular programs in collaboration with the sub-districts and district of Aceh Besar.

Keywords: *role; school committee;quality of education; madrasah*

A. Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataannya masih belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tangga l2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Selain itu komite sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu dan meningkatkan mutu pendidikan.

Organisasi komite sekolah juga telah dibentuk di madrasah yang ada di Aceh Besar, dalam hal ini peneliti mengambil dua madrasah yaitu MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh Besar sebagai objek dalam penelitian ini. Namun berdasarkan hasil pengamatan sementara peneliti di kedua madrasah tersebut, peneliti menemukan bahwa keberadaan komite sekolah cukup berpengaruh terhadapat pembelajaran siswa. Komite Sekolah (Madrasah) yang ada di madrasah tersebut sudah bekerja dalam melakukan perannya untuk membuat madrasah tersebut bisa sejajar dengan madrasah lainnya dalam hal mutu pendidikannya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kelulusan siswanya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ekstrakurikuler kedua madrasah ini bisa dikatakan lebih unggul dari madrasah lainnya. Dengan adanya kemauan siswa

dan dorongan dari pihak Komite untuk belajar menjadi salah satu faktor meningkatnya mutu pendidikan, akan tetapi peran serta guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan pada kedua madrasah yang menjadi objek dalam penelitian ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga diperlukan. Berdasarkan hasil temuan sementara, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian secara mendalam berkenaan dengan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses dan Mekanisme Pembentukan Organisasi Komite Madrasah di Kabupaten Aceh Besar

Komite Madrasah sebagai organisasi mitra madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di madrasah.Oleh sebab itu prose dan mekanisme pembentukan komite sangat harus diperhatikan oleh setiap lembaga pendidikan.berdasarkan hasil peneliti di MTsN 8 Aceh Besar dan MTsN 4 Aceh Besar tentang proses dan mekanisme pembentukan komite madrasah dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Dalam proses pembentukan Komite Madrasah MTsN 4 Aceh Besar bekerjasama dengan masyarakat serta orang tua murid. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MTsN 4 Aceh Besar sebagai berikut :

Pada dasarnya pembentukan Komite Madrasah di sini adalah berdasarkan peraturan pemerintah yang dibentuk dari hasil rapat dengan masyarakat dan wali murid dengan tujuan mengawasi dan mempererat hubungan kerjasama antara madrasah dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri.[1]

Proses pembentukan Komite Madrasah di Kabupaten Aceh Besar tidak terlepas dari keputusan yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala MTsN 4 Aceh Besar yang menyatakan:

[1] Hasil wawancara dengan Kepala MTsN 4 Aceh Besar, tanggal 19 Juli 2018.

Dalam proses pembentukan Komite Madrasah kami tetap berpegang berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan melalui musyawarah atau rapat yang diadakan 3 tahun sekali. Keanggotaan Komite Madrasah di MTsN 4 Aceh Besar terdiri dari masyarakat yang berasal dari orang tua murid, tokoh masyarakat, dari dewan guru.Kami juga melibatkan Badan Pertimbangan Desa sebagai anggota dari komite. Sedangkan untuk jumlah anggotanya, Komite Madrasah di MTsN 4 Aceh Besar ini sebanyak sembilan orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih oleh anggota komite sendiri.[2]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pembentukan Komite Madrasah di MTsN Kabupaten Aceh Besar berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan sedangkan anggota dan kepengurusannya diputuskan melalui hasil musyawarah atau rapat pihak madrsah dengan masyarakat dan wali murid. Dengan demikian pembentukan Komite Madrasah di MTsN Kabupaten Aceh Besar dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam pembentukan Komite Madrasah, pihak madrasah di MTsN Kabupaten Aceh Besar juga tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya.Komite Madrasah harus dibentuk berdasarkan pada prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau instruksi dari lembaga pemerintahan.Pembentukan Komite Madrasah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan berarti pembentukan Komite Madrasah dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan madrasah mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi oleh panitia persiapan, penentuan kriteria calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, sampai penyampaian hasil pemilihan kepada masyarakat. Akuntabel berarti pembentukan Komite Madrasah yang dilakukan oleh panitia persiapan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun finansial. Demokratis berarti bahwa proses pembentukan Komite Madrasah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan madrasah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pembentukan Komite Madrasah, pihak madrasah tidak serta merta memilih dengan

[2] Hasil wawancara dengan Kepala MTsN 4 Aceh Besar, tanggal 19 Juli 2018.

suka hati siapa yang menjadi ketua komite serta pengurusnya, tetapi melalui mekanisme dan proses dengan melakukan rapat dan pertimbangan dari semua pihak dalam memutuskan keputusan dalam pembentukan Komite Madrasah. Dari hasil rapat dapat tentukan siapa ketua dan pengurus dari Komite Madrasah.

Sejak awal disosialisasikan pembentukan Komite Madrasah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 diperkirakan Komite Madrasah telah terbentuk di hampir lebih 200 ribu satuan pendidikan mulai jenjang SD/MI sampai jenjang madrasah menengah. Namun diperkirakan pula pembentukan Komite Madrasah tersebut tidak atau belum mengikuti prinsip pembentukan Komite Madrasah yang diharapkan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kembali mekanisme pembentukan Komite Madrasah yang baku.

Berdasarkan agenda rapat mekanisme pembentukan Komite Madrasah di MTsN 4 Aceh Besar meliputi:

Pembentukan panitia persiapan meliputi masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orangtua peserta didik.

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Sosialisasi tentang Komite Madrasah dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. 2) Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Madrasah, dan Komite Madrasah yang sudah ada) tentang Komite Madrasah menurut Keputusan ini. 3) Menyusun kriteria dan mengindentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. 4) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. 5) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat. 6) Menyusun nama-nama anggota terpilih. 7) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Madrasah. 8) Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan pendidikan.

Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Madrasah terbentuk.[3]Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme Pembentukan Komite Madrasah di MTsN Kabupaten Aceh Besar meliputi: (1) membentuk forum soisialisasi kepada masyarakat; (2) menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota; (3) menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; (4) mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat; (5) menyusun nama-nama anggota terpilih; (6) memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite madrasah; (6) menyampaikan nama pengurus dan anggota komite madrasah kepada kepala satuan pendidikan setempat; (7) panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite madrasah terbentuk.

2. Perencanaan yang Dilakukan oleh Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di Kabupaten Aceh Besar

Salah satu faktor utama yang paling penting dalam menjalankan laju pendidikan adalah sisi pendanaan. Dengan kerjasama yang baik antara Komite Madrasah, pihak madrasah dan *stakeholders* lainnya, permasalahan tersebut diharapkan ada jalan keluar. Hasil wawancara Komite Madrasah, kepala madrasah, guru memberikan keterangan bahwa Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan.

Komite Madrasah MTsN 8 Aceh Besar melalui ketuanya memberikan keterangan beberapa perencanaan program yang dilakukannya di antaranya; (1) Pembentukan struktur Komite Madrasah dan rapat rutin Komite Madrasah dengan pihak madrasah tiap tiga bulan sekali atau tiap akhir semester. (2) Pihak Komite Madrasah merencanakan program dan melaksanakan pelaksanaan hari-hari besar agama dan nasional bersama-sama dengan madrasah lainnya agar jalinan komunikasi dan silaturahmi terjaga dengan pihak madrasah.Selain itu pihak madrasah juga menjalin hubungan dengan unsur kepolisian seperti polsek dan pegawai kecamatan lainnya serta komponen yang mempunyai pengaruh dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan madrasah.[4]

Dalam meningkatkan mutu pendidikan akan berpengaruh kepada seluruh aspek peserta didik yang mana akan membentuk kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT. Dengan hal tersebut selain adanya sarana

[3] Dokumentasi Agenda Rapat Komite Madrasah 4 Aceh Besar Tahun 2016.
[4] Hasil wawancara dengan Ketua Komite MTsN 8 Aceh Besar tanggal 30 Juli 2018.

dan prasarana maka ada juga perencanaan yang seharusnya dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan, sehingga pendidikan yang ada di lembaga tersebut dapat bermutu. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komite MTsN 4 Aceh Besar sebagai berikut:

Perencanaan program yang kami lakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 4 Aceh Besar ini diataranya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembelajaran, agar siswa nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar misalnya, pengadaan pendingin ruangan, mengontrol kebersihan lingkungan madrasah.Kami juga ikut serta dalam mengembangkan dan mengawasi nilai keagamaan siswa dengan melakukan kegiatan keagamaan, seperti shalat dhuhur berjamaah disertai dengan baca tulis Al-quran.Kami juga mendorong dan membina siswa agar ikut serta dalam kegiatan lomba di luar madrasah yang dilaksanakan di desa dan kecamatan, agar siswa merasa termotivasi dalam belajar.[5]

Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Peneliti melihat bahwa siswa/i MTsN 4 Aceh Besar setiap hari melakukan shalat dhuhur secara berjamaah dengan diawasi oleh guru bidang studi agama, peneliti juga melihat ikut sertanya Komite Madrasah yang bertindak sebagai imam shalat serta dilanjutkan dengan baca tulis Al-quran setelahnya.[6]Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa adanya kepedulian dan kerja dari pihak komite dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Langkah-langkah penting yang dilakukan oleh Komite Madrasah adalah melalui koordinasi dan sosialisasi kepada segenap komponen masyarakat.Strategi Komite Madrasah biasanya dimainkan komite, yang diawali terhadap segenap warga madrasah, dan orang tua siswa. Langkah selanjutnya dengan mengundang pihak dinas dan instansi terkait untuk dapat melakukan sosialisasi tentang fungsi dan kedudukan Komite Madrasah sebagaimana mestinya, untuk dapat mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang ideal dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komite MTsN 8 Aceh Besar, beliau menyatakan:

Setiap perencanaan program kegiatan atau program-program yang telah komite susun, seperti program pelaksanaan hari-hari besar Islam, terlebih dahulu kami

[5] Hasil wawancara dengan Ketua Komite MTsN 4 Aceh Besar tanggal 26 Juli 2018.
[6] Hasil observasi peneliti di MTsN 4 Aceh Besar tanggal 26 Juli 2018.

diskusikan dengan Kepala Madrasah.Setelah ada persetujuan dari beliau baru selanjutkan kami adakan rapat dengan pihak-pihak yang terkait untuk menindak lanjuti kegiatan dan program-program yang telah kami rencanakan.[7]

Berdasarkan hasil temuan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa ada beberapa perencanaan yang dilakukan oleh pihak Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan diantaranya yaitu dengan membentuk strutur komite serta mengadakan rapat rutin setiap akhir semester.Komite juga ikut langsung berperan dalam merencanakan, mengawasi dan membina siswa melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler. Komite Madrasah juga mengadakan sosialisasi kedudukan dan fungsi komite kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan dapat mendukung komite dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten aceh Besar

3. Pelaksanaan Program Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar

Secara formal hampir semua madrasah telah memiliki perangkat komite madrasah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di madrasah.Kehadiran komite madrasah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra madrasah, terutama bagi kepala madrasah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembagunan fisik, maupun non fisik.Program yang dilakukan oleh Komite Madrasah dengan seluruh komponen yang melibatkan pihak madrasah (kepala madrasah dan guru) dan orang tua siswa, serta lembaga-lembaga luar madrasah maupun masyarakat lainnya yang dilibatkan dalam rapat rutin Komite Madrasah setiap akhir semester.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala MTsN 8 Aceh Besar, beliau menyatakan:

Dalam rangka melaksanakan program yang telah di rancang bersama antara pihak madrasah, guru, masyarakat dan wali murid, pihak madrasah membuat rumusan visi dan misi madrasah, menyusun RKAS dan RAPBS serta mengembangkan potensi kearah yang lebih baik. Namun dalam proses pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Oleh sebab itu kami melibatkan Komite Madrasah untuk melakukan pendekatan dengan melakukan berbagai upaya dengan pihak madrasah (kepala madrasah) dan masyarakat dengan membuat rapat setiap tiga bulan sekali atau persemester, ikut mensahkan visi, misi madrasah serta RKS dan RKAS, serta menjalin tali silaturrahmi

[7] Hasil wawancara dengan Ketua Komite MTsN 8 Aceh Besar tanggal 30 Juli 2018.

antara warga madrasah dengan wali murid, Komite Madrasah juga bersedia menjadi pembina upacara, dan pada kesempatan yang lain Komite Madrasah juga turut mengundang perangkat polsek, kecamatan, puskesmas untuk menjadi pembina upacara untuk membuka wawasan siswa/i mengenai tupoksi masing-masing tamu undangan yang menjadi pembina upacara.[8]

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi di lapangan, peneliti melihat pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 yang menjadi pembina upacara adalah perangkat polsek. Dalam sambutannya, perangkat polsek menjelaskan tentang tugas pokok polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga dapat dicontoh oleh siswa/i MTsN 8 Aceh Besar.[9]

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya Komite Madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan, dengan melibatkan Komite Madrasah dalam segala aspek dalam membantu dalam penyusunan program yang ada di madrasah sehingga dapat membantu dan mengawasi pelaksanaan program dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Besar. Kendala yang dihadapi Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kurangnya komunikasi antara Komite Madrasah dengan kepala madrasah karena kurangnya waktu yang dimiliki oleh Komite Madrasah, sehingga program Komite Madrasah menjadi kurang efektif.

Dengan adanya beberapa perencanaan kegiatan yang ada di Madrasah Kabupaten Aceh Besar cukup memberikan banyak manfaat atau hasil bagi peserta didik itu sendiri, di antaranya hasil yang diterima oleh peserta didik dari terlaksananya kegiataan keagamaan yaitu: misalnya, diadakannya shalat jamaah dhuhur dan BTA (baca tulis al-qur'an) yang dilaksnakan di ruang shalat atau mushallah yang ada di madrasah, maka peserta didik yang ada di Kabupaten Aceh Besar sedikit demi sedikit dalam diri mereka telah tertanam pembiasaan shalat berjamaah, hal ini bisa dilihat dari shalat berjamaah dhuhur, walaupun tanpa adanya perintah terlebih dahulu dari guru agamanya dan kepala madrasah peserta didik sudah berantusias melaksanakan shalat dhuhur secara berjamaah tersebut.[10]

Selain itu juga, peserta didik di Kabupaten Aceh Besar menorehkan beberapa prestasi dalam bidang pendidikan berupa lomba pildacil (ceramah), qasidah rebana, dan

[8] Hasil wawancara dengan Kepala MTsN 8 Aceh Besar, tanggal 24 Juli 2018.
[9] Hasil observasi peneliti di MTsN 8 Aceh Besar tanggal 23 Juli 2018.
[10] Hasil observasi peneliti di MTsN 8 Aceh Besar tanggal 26 Juli 2018.

tilawatil qur'an yang dilaksanakan di desa ataupun di kota kecamatan meskipun tidak menorehkan juara pertama setidaknya menorehkan beberapa prestasi gemilang, karena dilihat dari latar belakangnya yang hanya madrasah umum yang hanya sedikit masukan tentang keagamaan tetapi tidak kalah dengan madrasah yang lainnya.

Sebagaimana wawancara dengan kepala MTsN 8 Aceh Besar sebagai berikut:

Adapun prestasi yang diraih peserta didik MTsN 8 Aceh Besar yaitu memperoleh juara pildacil (ceramah) di kantor kecamatan, memperoleh juara qasidah rebana di tingkat desa, dan memperoleh juara tilawatil qur'an tingkat Kabupaten Aceh Besar.[11]

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa madrasah di Kabupaten Aceh Besar mempunyai mutu pendidikan yang cukup baik. Dari hasil observasi dapat dilihat bahwa baikya mutu Pendidikan di madrasah Kabupaten Aceh Besar dapat dlihat dari keseharian siswanya yang setiap pagi melakukan salam, membaca doa sebelum belajar, dan membaca surah al-fatihah sebelum jam pertama dimulai yang dipinpin oleh ketua kelasnya masing-masing. Mereka juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakulikuler, dan mereka juga rajin shalat dhuhur berjamaah di mushalla serta memiliki prestasi dalam beberapa lomba yang di adakan oleh Kabupaten.[12]

Komite Madrasah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan madrasah sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di madrasah.Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya komite madrasah senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat, sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua Komite MTsN 8 Aceh Besar menjelaskan terjadinya hubungan yang harmonis anatara pihak madrasah dengan masyarakat terutama dalam kaitanya dengan peningkatan mutu pendidikan. Berikut kutipan wawancaranya:

Selain dalam pengembangan hal fisik, komite madrasah juga berperan sebagai penghubung antara madrasah, orang tua dan masyarakat.Dimana, apabila ada peserta didik yang mendapat masalah di madrasah atau nakal-nakal di madrasah, maka di sini

[11] Hasil wawancara dengan Kepala MTsN 8 Aceh Besar, tanggal 24 Juli 2018.
[12] Hasil observasi peneliti di MTsN 8 Aceh Besar tanggal 26 Juli 2018.

komite madrasah yang menyampaikan maksud madrasah terhadap siswa tersebut kepada orang tuanya secara kekeluargaan.[13]

Hal serupa yang dinyatakan oleh kepala MTsN 8 Aceh Besar sebagai berikut :

Komite Madrasah disini sangat berperan sebagai mediator atau penghubung antara pemerintah, madrasah, orang tua dan masyarakat sehingga dapat terjalinnya kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Setiap program yang dilakukan oleh komite selalu melibatkan pihak-pihak luar madrasah seperti puskesmas, kecamatan dan aparatur desa setempat dengan demikian program dan kegiatan dapat berjalan secara lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.[14]

Selanjutnya pelaksanaan program Komite Madrasah dalam bentuk pengembangan keterampilan siswa misalnya (bidang kepemimpinan, kerjasama tim dan berpikir kritis). Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari pola pengembangan kegiatan ekstra-kurikulum yang mendorong kegiatan akademik dan pengembangan pribadi.*Out put* dari kegiatan ekstrakurikuler yang sudah disepakati madrasah dengan komite bahwa siswa akan lebih memiliki keterampilan dan menambah rasa percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan kerjasama yang dijalin oleh perwakilan komite berpotensi nyata dalam meningkatkan motivasi belajar dalam sejumlah kegiatan pembelajaran.Ini menunjukkan bahwa peran komite adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan kontribusi dalam pembelajaran.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh wali murid MTsN 4 Aceh Besar bahwa:

Komunikasi kami sebagai wali murid serta masyarakat antara komite dengan pihak madrasah baru sebatas komunikasi dalam rangka koordinasi dalam menetapkan rencana program madrasah, karena semua rencana program madrasah sudah dibuat oleh pihak madrasah dan ditawarkan dalam sebuah forum pleno komite. Rencana program komite yang dibuat madrasah akan dibahas dalam pleno dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari komite madrasah. Secara prinsip bahwa tanggung jawab tanggung jawab komite madrasah adalah bersifat kolektif kolega, yaitu bahwa segala sesuatu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab ketua komite madrasah.[15]

---

[13] Hasil wawancara dengan Ketua Komite MTsN 8 Aceh Besar tanggal 30 Juli 2018.
[14] Hasil wawancara dengan Kepala MTsN 8 Aceh Besar, tanggal 24 Juli 2018.
[15] Hasil wawancara dengan S sebagai wali murid MTsN 4 Aceh Besar tanggal 23 Juli 2018.

Pelaksanaan program selalu menggunakan azas musyawarah, kekeluargaan dan kegotong royongan apabila terjadi perbedaan atau hambatan yang dihadapi pihak madrasah dengan komite madrasah.Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti yang mengamati secara langsung pada saat rapat Komite Madrasah dengan madrasah dan wali murid dalam pelaksanaan program komite yang telah disusun terlebih dahulu. Peneliti melihat bahwa setiap saran dan masukan yang diberikan oleh pihak madrasah maupun masyarakat, komite tidak serta merta menolak terhadap saran dan masukan ersebut namun Komite Madrasah menyatakan untuk mempertimbangkan setiap masukan dan saran yang telah diberikan sehingga menjadi sebuah keputusan yang bagus dalam melaksanakan program Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.[16]

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar sangat baik. Hal ini dapat kita lihat dari dilibatkannya seluruh unsur baik dari pihak madrasah sebagai penanggung jawab kegiatan serta pihak masyarakat sebagai pemberi saran dan masukan terhadap pelaksanaan program komite.Adapun program-program yang dilaksanakan diantarnya yaitu program keagamaan serta program ektrakurikuler yang bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan hasil pemaparan dan temuan penelitian, peneliti menganalisa bahwa pembentukan Komite Madrsah di MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh besar memliki kesamaan namun masih ada sedikit perbedaan yaitu dalam hal pemilihan anggota. Berikut penulis uraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 8.Perbedaan dan persamaan Komite Madrasah di MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh Besar.

Persamaan	Perbedaan
• Proses pembentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dilakukan melalui	• Pemilihan struktur komite di MTsN 4 Aceh Besar berdasarkan hasil rapat, sedangkan di

[16] Hasil observasi peneliti di MTsN 4 Aceh Besar pada tanggal 27 Juli 2018.

musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, wali murid. • Melakukan perencanaan program melalui sosialisasi terhadap masyarakat madrasah dan masyarakat umum.	MTsN 8 Aceh Besar di pilih oleh anggota komite itu sendiri. • Perencanaan dan pelaksaaan program dengan mengikut sertakan pihak luar madrasah.

Hubungan kerjasama antara komite dengan madrasah di Kabupaten Aceh Besar adalah sebuah hubungan komunikasi yang dibangun bersama dalam rangka menjalankan peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan. Komite Madrasah juga berperan sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan fungsi komite madrasah sebagai penampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan serta melaksanakan peran komite sebagai pendukung *(supporting agency)* baik yang berwujud pemikiran, maupun tenagadalam penyelenggaraan pendidikan.[17]

Untuk inilah, maka institusi pendidikan membutuhkan suatu sistem (manajemen) pengelolaan yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu dan mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik Internal customer maupun *external customer*. Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat pelanggan (orang tua, siswa, dan *stakeholder*) terhadap lembaga pendidikan tersebut.Dukungan pelanggan tersebut juga tergantung apakah kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi dan dipuaskan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang secara efisien dan efektif dalam proses belajar-mengajar artinya dimana hasil dari peserta didik telah mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh madrasah dari hasil wawancara sekaligus observasi yang peneliti lakukan, peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Besar dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari adanya struktur organinasi yang disusun melalui perencanaan serta melibatkan masyarakat dalam pemilihan anggota komite serta adanya

[17] Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis …*, 42.

program-program yang dirancang dan dilaksanakan dalam proses meningkatan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini menunjukan bahwa Komite Madrasah berperan dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Besar bukan hanya sebagai nama organisasi namun turut mengambil kebijakan dalam pendidikan.

Berdasarkan pemaparan pada bab II dan hasil temuan, peneliti menganilisa bahwa peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Besar di antaranya yaitu:

Komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi madrasah memiliki arti bahwa komite madrasah dipandang sebagai mitra kerja kepada madrasah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan madrasah melalui komite madrasah, orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasara yang akan dicapai oleh madrasah, sampai dengan menetapkan cara atas strategi yang akan di tempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program dan kegiatan madrasah. Selama ini keberadaan komite madrasah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan karena komite madrasah itu merupakan pembantu utama satuan pendidikan dalam memakmurkan pendidikan madrasah (lembaga pendidikan) selain masyarakat internal madrasah.

Segala macam program yang akan dilaksanakan madrasah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite madrasah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal madrasah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil temuan peneliti dalam proses pembentukan komite madrasah di MTsN 4 Aceh besar dan MTsN 8 Aceh besar yang melalui mekanisme pertimbangan dan musyawarah dengan melibatkan semua pihak.

Peran komite madrasah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan di antaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya madrasah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki madrasah yang rusak. Hal inilah yang dilakukan oleh MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh Besar dalam pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di madrasah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan

pendidikan. Peran pendukung yang dipegang oleh kedua komite madrasah tersebut tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu.Dengan berperan sebagai *supporting agency* ini, komite madrasah di kedua madrasah ini dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. Selain fungsinya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite madrasah MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh Besar juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan.

Peran komite madrasah MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh Besar selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di madrasah. Peran pengawasan yang dilakukan oleh komite kedua madrasah ini meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di madrasah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di madrasah.

Komite madrasah MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh Besar juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di madrasah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap madrasah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Komite madrasah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, madrasah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite madrasah untuk disampaikan kepada madrasah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengedintifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat.Aspirasi yang disalurkan melalui komite madrasah dimanfaatkan oleh madrasah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan.Komite madrasah di MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh Besar juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan madrasah sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat.Bagi komite madrasah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di madrasah.Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya madrasah.maupun komite madrasah senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat.

Inilah beberapa peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis terhadap data-data yang penulis temukan di lapangan melalui observasi, wawancara dan hasil analisa dokumen di MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh Besar.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah di MTsN 4 Aceh Besar dan MTsN 8 Aceh Besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses dan mekanisme pembentukan komite madrasah di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan keputusan Kementrian Pendidikan dalam membentuk Organisasi Berbasis Masyarakat yaitu melalui musyawarah atau rapat yang diadakan 3 tahun sekali secara transparan, akuntabel, dan demokratis serta melibatkan masyarakat sebagai mitra satuan pendidikan.

Perencanaan yang dilakukan oleh Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Besar yaitu membentuk struktur Komite Madrasah dan rapat rutin Komite Madrasah dengan pihak madrasah dan masyarakat tiap tiga bulan sekali atau tiap akhir semester, merencanakan dan melaksanakan program perayaan hari-hari besar agama dan nasional bersama-sama dengan madrasah lainnya.

Pelaksanaan program Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar sangat baik. Hal ini dapat kita lihat dari dilibatkannya seluruh unsur baik dari pihak madrasah sebagai penanggung jawab kegiatan serta pihak masyarakat sebagai pemberi saran dan masukan terhadap pelaksanaan program komite. Adapun program-program yang dilaksanakan diantarnya yaitu program keagamaan serta program ektrakurikuler yang bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas, 2001.

Fattah, Nanang. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Modul Pelatihan Praktik yang Baik. *Manajemen Berbasis Sekolah: Peran Serta Masyarakat, Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

Mulyono. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Sa'ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun. *Perencanaan Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Suharsaputra, Uhar. *Administrasi Pendidikan.* Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sujanto, Bedjo. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Sagung Seto, 2007.

Suparlan. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, BAB IX Standar Pendidikan Nasional, Pasal 35 ayat 1.

Zahroh, Aminatul. *Total Quality Managemen.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Hayat, Bahrul. *Benchmark International Mutu Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Umar, Jahja. *Penilaian Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia*. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2011.